# BAB V
# SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung bidang pajak daerah bagian pajak parkir, tepatnya yang berkaitan dengan prosedur SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Prosedur SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak parkir

   Prosedur SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah ini dalam pembuatan SKPD sudah secara otomatis (memiliki database) tetapi masih banyak peng*input*an yang masih tertulis yaitu menggunakan pulpen dan kertas. Prosedur ini dimulai dari pendaftaran calon wajib pajak yang di layani oleh petugas pendataan yang selanjutnya pembuatan SKPD untuk pembayaran pajak selanjutnya.

B. Fungsi dan Dokumen yang terkait

   1. Fungsi yang terkait pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung adalah sebagai berikut: Wajib Pajak, Petugas Pendataan, Staf Administrasi, Dokumen Pengolahan Datam (Dohlata), Seksi Penetapan, Kepala Bidang Pajak Daerah (Ka BPD), Seksi Pelayanan dan Pengaduan (Yandu), Petugas Pajak dan Bendahara Khusus Penerimaan (BKP)
   2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah) pajak parkir

terdiri dari: SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), Himpunan SPTPD, SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan DP203

## 5.2 Saran

Dari hasil tinjauan dan analisa penulis selama melaksanakan Kerja Praktek pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, penulis mempunyai saran, yaitu: Prosedur SPTPD hanya menggunakan *software* Microsoft Word 2007 dan Microsoft Excel 2007. Walaupun aplikasi yang digunakan belum dapat mencakup seluruh fungsi yang terkait pada instansi ini, mungkin suatu saat dapat dibuatkan aplikasi yang dapat mencakup seluruh fungsi yang terkait, agar membuat sistem informasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, tepat waktu dan akurat.